ANALISIS PERUBAHAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Mikhael Lambert Ngutra¹, Moh Ery Kusmiadi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: maichelngutra@gmail.com

Abstrak

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan fundamental pada struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama pada kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Namun, pasca amandemen, posisinya bergeser menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis atau alasan di balik perubahan kewenangan MPR tersebut serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan wewenangnya sebelum dan sesudah amandemen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perubahan kewenangan MPR didasari oleh keinginan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat secara murni, menerapkan sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), serta memperkuat sistem presidensial melalui penerapan sistem bikameral. Perubahan ini secara signifikan menggeser paradigma dari supremasi MPR menjadi kesetaraan antar lembaga negara.

Kata kunci: MPR; Kewenangan; Amandemen UUD 1945; Lembaga Negara.

Abstract

The amendment of the 1945 Constitution brought fundamental changes to Indonesia's state structure, particularly regarding the position and authority of the People's Consultative Assembly (MPR). Before the amendment, the MPR was the highest state institution that fully held the people's sovereignty. However, post-amendment, its position shifted to that of a high state institution, equal to other institutions. This research aims to analyze the ratio legis or the reasoning behind the change in the MPR's authority and to identify the similarities and differences in its powers before and after the amendment. Using a normative juridical research method through a literature review, this study analyzes primary and secondary legal documents. The results indicate that the ratio legis for the change in the MPR's authority was based on the desire to purely uphold the principle of people's sovereignty, implement a system of checks and balances, and strengthen the presidential system through the application of a bicameral system. This change significantly shifted the paradigm from MPR supremacy to equality among state institutions.

Key words: MPR; Authority; 1945 Constitution Amendment; State Institution.

Article History:

Received : 2025-06-04

Revised : 2025-06-28

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

Struktur ketatanegaraan sebuah negara merupakan cerminan dari falsafah, cita-cita politik, dan dinamika historis yang melingkupinya. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan konstitusional yang telah melewati berbagai fase interpretasi dan implementasi. Sebelum era reformasi 1998, UUD 1945 diinterpretasikan untuk membangun sebuah struktur kekuasaan yang bersifat vertikal-hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai puncak dari hierarki tersebut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) secara tegas menyatakan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat." Klausul ini menjadikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi (supreme body), yang secara teoretis merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat secara utuh.

Konsepsi ini menempatkan MPR pada posisi sentral yang membawahi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam konstruksi ini, Presiden berkedudukan sebagai mandataris MPR, yang berarti Presiden diangkat, bertanggung jawab kepada, dan dapat diberhentikan oleh MPR. Model ini, yang sering disebut sebagai sistem MPR, menciptakan sebuah arsitektur kekuasaan yang sangat terkonsentrasi. Namun, dalam praktiknya, konsentrasi kekuasaan yang besar pada satu lembaga justru menimbulkan berbagai persoalan fundamental. Sistem ini terbukti gagal menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang efektif antar cabang kekuasaan. Sebaliknya, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan eksekutif (executive heavy) yang memanfaatkan MPR sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan status quo. Sejarah mencatat, melalui Ketetapan MPR, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, dan Presiden Soeharto dapat mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade.

Gelombang reformasi yang memuncak pada tahun 1998 menjadi titik balik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gerakan ini lahir dari akumulasi krisis multidimensional—krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kepercayaan terhadap hukum dan konstitusi. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945. Tuntutan ini didasari oleh kesadaran bahwa UUD 1945 dalam format aslinya memiliki kelemahan-kelemahan inheren, seperti pasal-pasal yang bersifat multitafsir (ambiguous) dan minimnya jaminan terhadap hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan yang jelas. Para pendiri bangsa sendiri, termasuk Soekarno, menyadari bahwa UUD 1945 disusun dalam situasi mendesak dan bersifat sementara, atau seperti yang disebutnya "UUD kilat," yang perlu disempurnakan di kemudian hari.

Proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002 secara fundamental mengubah lanskap ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang paling signifikan adalah redefinisi konsep kedaulatan rakyat dan restrukturisasi kelembagaan negara. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan, dan posisinya digeser menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga lainnya. Perubahan ini secara langsung berdampak pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, mencabut beberapa fungsi vital yang sebelumnya melekat pada MPR.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca-reformasi 1998. Salah satu perubahan paling mendasar adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini dipicu oleh krisis multidimensional yang menuntut adanya reformasi struktural, terutama dalam bidang politik dan hukum, untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Sebelum amandemen, UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat secara penuh (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 lama). Struktur vertikal-hirarkis ini menjadikan MPR sebagai supreme body yang memiliki kekuasaan tak terbatas dan membawahi lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Presiden. Namun, konsentrasi kekuasaan yang besar ini dalam praktiknya rentan disalahgunakan dan tidak menciptakan mekanisme saling kontrol dan keseimbangan (checks and balances) yang efektif.

Era reformasi mendorong pergeseran paradigma dari supremasi MPR menuju kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini secara langsung berdampak pada kewenangan yang dimiliki oleh MPR. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama:

1. Apakah ratio legis diubahnya wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca amandemen UUD 1945?
2. Apakah persamaan dan perbedaan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?

LITERATURE REVIEW

Analisis terhadap perubahan kewenangan MPR didasarkan pada beberapa kerangka teori fundamental dalam hukum tata negara. Konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan doktrin sentral dalam penyelenggaraan negara modern. Indonesia secara eksplisit mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.

Teori ini, yang akarnya dapat dilacak hingga pemikiran Aristoteles tentang polis, mendalilkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak individu penguasa. Setiap tindakan, baik oleh organ negara maupun warga negara, harus memiliki landasan hukum yang sah. Ciri-ciri esensial dari negara hukum meliputi: (1) adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) sistem peradilan yang bebas, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain; dan (3) legalitas dalam segala bentuknya, yang berarti semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Perubahan kedudukan MPR dari lembaga supremasi menjadi lembaga yang setara dengan yang lain merupakan manifestasi dari penguatan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan MPR tidak lagi absolut, melainkan dibatasi dan diatur secara tegas oleh konstitusi.

Teori Negara Hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan. Perubahan kedudukan MPR adalah upaya untuk memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Selanjutnya, Teori Kedaulatan Rakyat yang dikemukakan oleh pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau menjadi landasan utama, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Amandemen UUD 1945 mengalihkan pelaksanaan kedaulatan dari yang semula dimonopoli oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut konstitusi, yang membuka jalan bagi partisipasi rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Teori kedaulatan rakyat adalah antitesis dari teori kedaulatan raja atau kedaulatan negara. Teori ini menegaskan bahwa sumber tertinggi dari segala kekuasaan politik dalam suatu negara adalah rakyat itu sendiri. Gagasan ini berkembang dari pemikiran para filsuf Pencerahan seperti John Locke dengan konsep kontrak sosialnya, yang menyatakan bahwa pemerintah dibentuk atas persetujuan rakyat (*consent of the governed*) untuk melindungi hak-hak alamiah mereka. Jean-Jacques Rousseau lebih jauh mengelaborasi konsep ini dengan gagasannya tentang "kehendak umum" (*volonté générale*), di mana kedaulatan tidak dapat diwakilkan dan harus mencerminkan kepentingan kolektif seluruh rakyat. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 pra-amandemen menafsirkan kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang "dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Hal ini menciptakan sebuah paradoks, di mana kedaulatan yang sejatinya milik rakyat justru dieksekusi secara absolut oleh sebuah lembaga. Amandemen UUD 1945 mengoreksi distorsi ini dengan menyatakan bahwa kedaulatan rakyat "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan ini mengembalikan hakikat kedaulatan kepada rakyat, yang pelaksanaannya didistribusikan melalui berbagai mekanisme demokratis yang diatur dalam konstitusi, seperti pemilihan umum langsung dan melalui lembaga perwakilan.

Teori Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*) dari Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi relevan. Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni, amandemen ini bertujuan memperjelas pembagian kekuasaan dan menciptakan mekanisme *checks and balances* antar lembaga. Terakhir, Untuk mencegah absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan, teori pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu melalui konsep *Trias Politica* menjadi sangat relevan.

Teori ini mengusulkan pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yang terpisah dan seimbang: legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum dan pengadil). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suatu sistem di mana setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Struktur ketatanegaraan Indonesia pra-amandemen dengan supremasi MPR tidak sejalan dengan teori ini, karena terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Amandemen UUD 1945 secara sadar mengadopsi prinsip ini dengan mendistribusikan ulang kekuasaan. Kekuasaan legislatif kini terbagi antara DPR dan Presiden, dengan DPD memiliki peran tertentu. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan

kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. MPR sendiri bertransformasi menjadi lembaga dengan fungsi-fungsi spesifik (konstitutif dan prosedural) dalam kerangka checks and balances, bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang membawahi cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Teori Perwakilan menjelaskan bagaimana aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan. Perubahan komposisi MPR yang kini terdiri dari anggota DPR dan DPD merupakan upaya untuk mereformasi sistem perwakilan menjadi lebih demokratis dengan basis keterwakilan politik dan keterwakilan daerah. Demokrasi, yang secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat" (demos dan kratos), diwujudkan dalam negara modern melalui mekanisme perwakilan (representative democracy). Mengingat kompleksitas dan skala negara modern, demokrasi langsung seperti di Athena kuno tidak lagi praktis. Oleh karena itu, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan (parlemen) yang bertugas menyuarakan aspirasi dan mengambil keputusan atas nama mereka.

Teori perwakilan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Logeman dan Arbi Sanit, mengkaji hubungan antara wakil dan yang diwakili. Amandemen UUD 1945 mereformasi sistem perwakilan di Indonesia secara fundamental. Penghapusan Utusan Golongan yang diangkat dan pembentukan DPD yang dipilih langsung dari setiap provinsi merupakan upaya untuk menciptakan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel dan legitimasinya murni berasal dari rakyat. Perubahan komposisi MPR yang kini terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD dimaksudkan untuk menciptakan sebuah majelis yang merefleksikan dua jenis keterwakilan sekaligus: keterwakilan politik (melalui partai politik di DPR) dan keterwakilan teritorial/daerah (melalui DPD). Transformasi ini adalah inti dari upaya membangun demokrasi perwakilan yang lebih substantif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah kajian yang memfokuskan analisisnya pada norma-norma, kaidah, asas, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum terkait kewenangan MPR, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua produk hukum yang relevan dengan kedudukan dan kewenangan MPR, terutama UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, serta peraturan organik di bawahnya seperti Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pendekatan Historis (Historical Approach): Pendekatan ini digunakan untuk melacak dan memahami latar belakang sejarah serta proses perubahan kewenangan MPR. Analisis historis ini mencakup kajian terhadap risalah sidang BPUPKI, PPKI, dan sidang-sidang MPR pada era reformasi untuk memahami konteks dan dinamika pemikiran yang melandasi setiap perubahan konstitusional.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara untuk memahami konsep-konsep kunci seperti kedaulatan rakyat, supremasi lembaga, checks and balances, dan sistem perwakilan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli dan naskah setelah amandemen), Ketetapan MPR, serta Undang-Undang terkait seperti UU No. 27 Tahun 2009.
2. Bahan Hukum Sekunder yakni Buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum tata negara, kewenangan MPR, dan amandemen konstitusi.
3. Bahan Hukum Tersier yakni Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, dengan menginventarisasi, membaca, dan mencatat data yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diklasifikasikan akan diuraikan secara sistematis, diinterpretasikan secara yuridis, dan dihubungkan dengan kerangka teori yang ada untuk membangun argumentasi yang logis. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis yang bersifat umum menuju ke simpulan yang bersifat khusus untuk menjawab rumusan masalah

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penilaian terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Dalam konteks ini, penulis melakukan analisis mengenai Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi sifat penelitian, penulis mengadopsi pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis Perubahan Wewenang MPR

Hasil analisis menunjukkan bahwa ratio legis atau landasan pemikiran di balik perubahan wewenang MPR adalah untuk melakukan restrukturisasi fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Alasan utamanya adalah untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat secara sungguh-sungguh. Sistem lama yang memberikan kedaulatan penuh kepada MPR dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat secara langsung dan telah terbukti disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan otoriter, seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pemilihan presiden yang berulang kali oleh figur yang sama.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" menjadi pintu masuk utama perubahan. Hal ini menggeser sistem dari yang bersifat vertikal-hirarkis dengan supremasi MPR menjadi sistem horizontal-fungsional yang mengedepankan prinsip checks and balances. Dengan kedudukan yang setara, lembaga-lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.

Selain itu, perubahan ini juga merupakan konsekuensi dari diadopsinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dengan dipilih langsung, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat. Ini menghapus salah satu kewenangan terpenting MPR sebelumnya, yaitu memilih presiden. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan perubahan komposisi keanggotaan MPR juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem perwakilan bikameral yang lebih efektif, di mana aspirasi politik dan aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang.

Penegakan Kedaulatan Rakyat Secara Murni Landasan filosofis utama adalah keinginan untuk mengembalikan dan menegakkan kedaulatan rakyat pada makna sejatinya. Rumusan Pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen ("...dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat") diinterpretasikan sebagai penyerahan total kedaulatan dari rakyat kepada MPR. Rakyat dianggap telah selesai melaksanakan kedaulatannya setelah memilih wakil-wakilnya, dan selanjutnya MPR-lah yang menjadi subjek tunggal kedaulatan tersebut. Praktik ini terbukti menciptakan distorsi, di mana MPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru menjadi entitas kekuasaan yang terpisah dan bahkan dapat bertindak tanpa merefleksikan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pengalaman pada masa Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bagaimana MPR dapat diarahkan oleh kekuasaan eksekutif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang justru menegasikan kedaulatan rakyat, seperti pengangkatan presiden seumur hidup.

Amandemen mengubah pasal tersebut menjadi "...dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Perubahan frasa dari "dilakukan sepenuhnya oleh MPR" menjadi "dilaksanakan menurut UUD" memiliki implikasi yang sangat mendasar. Kedaulatan tidak lagi dimonopoli oleh satu lembaga, melainkan didistribusikan kepada berbagai lembaga negara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam konstitusi. Rakyat kini dapat melaksanakan kedaulatannya secara langsung melalui pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, serta secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, setiap lembaga negara menjadi

pelaksana parsial dari kedaulatan rakyat, dan tidak ada lagi yang dapat mengklaim sebagai penjelmaan tunggal kedaulatan tersebut.

Implementasi Prinsip Checks and Balances Konsekuensi logis dari penghapusan supremasi MPR adalah terbukanya jalan untuk membangun sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Struktur ketatanegaraan yang vertikal-hirarkis secara inheren tidak memungkinkan adanya mekanisme kontrol yang setara. Sistem supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara lain dalam posisi subordinat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mengawasi atau mengimbangi kekuasaan MPR. Yang terjadi justru sebaliknya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas untuk mengontrol lembaga di bawahnya.

Dengan menempatkan MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK dalam posisi yang setara (horizontal-fungsional), setiap lembaga dapat menjalankan fungsinya sambil diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain. Contohnya, kekuasaan legislasi yang sebelumnya didominasi Presiden, kini menjadi domain bersama antara DPR dan Presiden, di mana persetujuan bersama menjadi syarat mutlak. Produk legislasi tersebut selanjutnya dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden sebagai kepala eksekutif diawasi oleh DPR melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam kasus pelanggaran hukum serius, proses pemakzulan (impeachment) menjadi mekanisme kontrol tertinggi yang melibatkan tiga lembaga (DPR, MK, dan MPR) secara berjenjang. Sistem inilah yang menjadi jantung dari sebuah negara demokrasi modern yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Salah satu agenda utama reformasi adalah mempertegas sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun sejak awal disebut menganut sistem presidensial, praktik ketatanegaraan pra-amandemen menunjukkan ciri-ciri parlementer yang kental, terutama dalam hal pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Presiden yang berstatus sebagai mandataris MPR wajib menyampaikan pidato pertanggungjawaban di akhir masa jabatannya, yang dapat diterima atau ditolak oleh MPR. Penolakan terhadap pertanggungjawaban ini dapat berujung pada pemberhentian presiden. Mekanisme ini menciptakan sistem yang hibrida dan tidak stabil.

Untuk memperkuat sistem presidensial, dua langkah krusial diambil melalui amandemen. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini menjadikan sumber legitimasi presiden berasal langsung dari rakyat, bukan lagi dari MPR. Kedua, penghapusan mekanisme pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Presiden tidak lagi berstatus sebagai mandataris MPR. Pertanggungjawaban presiden kini bersifat politis (kepada rakyat melalui pemilu berikutnya) dan hukum (melalui mekanisme impeachment jika melanggar konstitusi). Dihapuskannya kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan presiden berdasarkan pertimbangan politik (misalnya, GBHN tidak dijalankan) adalah pilar utama dari penguatan sistem presidensial murni.

Reformasi Sistem Perwakilan Menuju Bikameralisme Struktur keanggotaan MPR sebelum amandemen terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Keberadaan Utusan Golongan (termasuk dari TNI/Polri) yang diangkat dan tidak melalui pemilihan seringkali menjadi alat kooptasi oleh eksekutif untuk mengontrol MPR. Reformasi menuntut sistem perwakilan yang murni berasal dari pilihan rakyat.

Amandemen menghapus fraksi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sebagai gantinya, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi untuk menyuarakan kepentingan daerah. Dengan demikian, struktur MPR pasca-amandemen terdiri dari seluruh anggota DPR (yang mewakili aspirasi politik/partai) dan seluruh anggota DPD (yang mewakili aspirasi daerah). Struktur ini, meskipun sering disebut sebagai soft bicameralism karena kewenangan DPD yang terbatas, merupakan langkah menuju sistem dua kamar yang bertujuan menciptakan representasi yang lebih komprehensif dan seimbang antara keterwakilan politik nasional dan keterwakilan kepentingan daerah.

Persamaan dan Perbedaan Wewenang MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen

Analisis perbandingan terhadap kewenangan MPR menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang signifikan.

Persamaan

Transformasi kelembagaan MPR secara langsung tercermin dalam perubahan tugas dan wewenangnya, yang dapat dianalisis melalui perbandingan sebelum dan sesudah amandemen. Persamaan Wewenang Di tengah berbagai perubahan drastis, satu kewenangan fundamental MPR tetap dipertahankan, yaitu wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945, menegaskan bahwa MPR tetap memegang kekuasaan konstitutif (constituent power). Artinya, MPR adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap hukum dasar negara. Dipertahankannya kewenangan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, MPR tetap memiliki posisi yang unik dan strategis sebagai penjaga gerbang konstitusi. Fungsi ini memastikan bahwa konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun proses perubahannya tetap berada dalam koridor kelembagaan yang representatif. Kewenangan ini menegaskan posisi MPR sebagai penjaga konstitusi

Perbedaan

Perbedaan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen jauh lebih banyak dan mendasar, antara lain:

1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden: Sebelum amandemen, ini adalah salah satu kewenangan utama MPR. Setelah amandemen, kewenangan Satu-satunya kewenangan fundamental yang tetap dimiliki MPR baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah wewenang konstitutif, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945). ini dihapus karena presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Wewenang MPR kini berubah menjadi melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): Dahulu MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman bagi presiden. Kewenangan ini dihapus dan digantikan oleh sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN).
3. Meminta dan Menilai Pertanggungjawaban Presiden: Sebelum amandemen, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kini, mekanisme pertanggungjawaban presiden bersifat politis dan hukum melalui mekanisme impeachment yang melibatkan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi, bukan lagi melalui laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan kepada MPR.
4. Status sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Status ini secara eksplisit hilang. MPR kini adalah lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945 merupakan sebuah pergeseran paradigma ketatanegaraan yang krusial. Ratio legis perubahan ini adalah untuk membongkar struktur kekuasaan yang terpusat dan otoriter, serta membangun sistem yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat, prinsip checks and balances, dan penguatan sistem presidensial. Perbedaan utama kewenangan MPR terletak pada hilangnya fungsi sebagai pemilih presiden dan penyusun GBHN, serta berubahnya status dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan yang lain. Satu-satunya persamaan kewenangan yang mendasar adalah sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat dan penyelenggara negara mengenai kedudukan dan fungsi MPR pasca amandemen agar tidak terjadi kerancuan interpretasi.
2. Meskipun kewenangnya berubah, peran MPR dalam menjaga ideologi dan konstitusi negara harus tetap diperkuat melalui pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya secara optimal, seperti pengkajian sistem ketatanegaraan dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
3. Perlu adanya kajian berkelanjutan mengenai efektivitas sistem bikameral (DPR dan DPD) dalam struktur perwakilan di Indonesia untuk memastikan aspirasi rakyat dan daerah benar-benar terwakili.

Reference

Books:

- Achmad Kosasih, M. M., *Legislasi Dan Perwakilan Politik*. Indigo Media. ((2023), n.d.).
- Afiyah, S., & Hadi, A., *Hukum Tata Negara*. Academia Publication. ((2024), n.d.).
- Ahmad Mustanir, S. I. P., Amane, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina. ((2023), n.d.).
- Ali, H. Z., *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. ((2023), n.d.).
- Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L., *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025), n.d.).
- Armia, M. S., *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. ((2022), n.d.).
- Asshiddiqie J, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).
- Buana, M. S., & SH, M., *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Sinar Grafika. ((2024), n.d.).
- Hidayat, D. S., & Haryono, E., *Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis*. Kepustakaan Populer Gramedia. ((2024), n.d.).

Journals:

- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Konstitusi, M. J. P., "RELEVANKAH MENGUBAH KONSTITUSI TENTANG: MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE?. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode (2021): Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden, 47." ((2021), n.d.).
- Kurnia Saleh, S. H., *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Guepedia. ((2020), n.d.).
- Mz, I., "Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini. *Ganec Swara*, 14(2), 615-623," 2020, n.d.
- Kusmiadi, M. E., Azis, M., & Rumlus, M. H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli (Studi Kasus di Kabupaten Bima). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 5(1), 9-21.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Nasution, E. R., *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. ((2024), n.d.).
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK*, 5(1), 270-277.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2025). SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK*, 5(1), 278-284.
- Suarda, R. Y., & HS, W. N., "Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2585-2595," (2025), n.d.
- Umboh, C. J., "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1),," (2020), n. Hidayat, D. S., & Haryono, E., *Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis*. Kepustakaan Populer Gramedia. ((2024), n.d.).d.

NETRA, P., "KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," (2022)., n.d.